

SKRIPSI

PENGAWASAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) ASOSIASI SOLIDARITAS MASYARAKAT UNTUK TRANSPARANSI (SOMASI) DALAM UPAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019-2020

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu(S1)
Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH:

MUTMAINNA
NIM. 218130028

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021-2022**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGAWASAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
ASOSIASI SOLIDARITAS MASYARAKAT UNTUK
TRANSPARANSI (SOMASI) DALAM UPAYA PENGADAAN
BARANG DAN JASA (PBJ) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2019-2020**



Disusun dan Diajukan Oleh :

MUTMAINNA
NIM.218130028

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah Dipriksa dan Disetujui Untuk Diuji Dalam Sidang Skripsi
Mataram, 3 Februari 2022

Pembimbing I

Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN.0008075914

Pembimbing II

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PENGAWASAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
ASOSIASI SOLIDARITAS MASYARAKAT UNTUK TRANSPARANSI
(SOMASI) DALAM UPAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)
PROVINSI NUSA TENGGARA BARATTAHUN 2019-2020

Oleh :

MUTMAINNA
NIM.218130028

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal 3 Februari 2022 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Tim Penguji

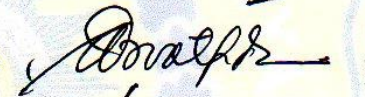
1. Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN.0008075914

PU (



2. Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

PP (



3. Drs.H.Mustamin H.Idris, MS
NIDN.0031126484

PN (



Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, menyatakan bahwa :

Nama : Mutmainna
Nim : 218130028
Alamat : Desa Tatede , Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa

Memang benar skripsi yang berjudul Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asosiasi Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (SOMASI) Dalam Upaya Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2020 adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 3 februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Mutmainna
NIM.218130028



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutmainna
NIM : 218130028
Tempat/Tgl Lahir : TATEDE, 16 OKTOBER 2000
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 0852-3892-2322
Email : iranina@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PENGAWASAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) ASOSIASI SOLIDARITAS
MASYARAKAT UNTUK TRANSPARANSI (SOMASI) DALAM UPAYA PENGADAAN
BARANG DAN JASA (PBJ) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019-2020

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 394

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 9 Februari 2022
Penulis



MUTMAINNA
NIM. 218130028

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUTMAINNA.....
NIM : 210130028.....
Tempat/Tgl Lahir : TATEDE, 16 OKTOBER 2000.....
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN.....
Fakultas : FISIPOL.....
No. Hp/Email : 0852-3892-2322 / nanic0450@gmail.com.....
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENGAWASAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) ASOSIASI SOLIDARITAS
MASYARAKAT UNTUK TRANSPARANSI (SOMASI) DALAM UPAYA PENGADAAN BARANG
DAN JASA (PBJ) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 - 2020

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 9 Februari 2022

Penulis



MUTMAINNA
NIM. 210130028

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

“Nasib memang diserahkan kepada manusia untuk digarap, tetapi takdir harus ditandatangani di atas materai dan tidak boleh digugat kalau nanti terjadi apa-apa, baik atau buruk.”

(Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono)

“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Buka mata, buka telinga, perluas dan lapangkan hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap proses dan momen dalam hidupmu, langkah mu masih panjang.”

(Mutmainna)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dan telah diselsaikannya skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkannya kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta bapak Sukiman MP dan Ibu Tuti Suryani yang senantiasa memberikan dukungan berupa do'a, moril maupun materil.
2. Kakak tersayangku Indri Nopiani dan suaminya Fery Kusuma Wijaya.
3. Kakak lelakiku Eki Fikriansyah dan istrinya Lia.
4. Keponakanku tercinta Aisyah Anindya Wijaya dan Muhammad Abyan.
5. Kekasihku tercinta Riski Fitra Nanda.
6. Keluarga Besar H.Saruji dan Muhidin Poro.
7. Sahabatku tersayang Nabila Putri Maysarah, Aninda Astriana Safitri, Raodatul Jannah, Desi Prastiwi, Astri Komala Yunda, Wiwik Haswinda.
8. Teman-teman tercinta kelas A ilmu pemerintahan angkatan 2018.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kekuatan yang diberikan Allah SWT kepada penulis untuk bisa menyelesaikan amanah penulisan proposal ini dan segala kewajibanku sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal yang berjudul “Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asosiasi Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (SOMASI) Dalam Upaya Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2020” . Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber inspirasi umat islam untuk terus berjuang dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Penelitian ini dilaksanakan untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Penulis menyadari bahwa proposal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang membantu, terutama kepada :

1. Bapak Dr.H. Arsyad Abd Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr.H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ayatullah Hadi S.IP., M.IP selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan proposal ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Umumnya Dan Khususnya Dosen-Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kedua Orang Tuaku Tercinta Super Hero terbaik didunia Ayahanda Sukiman MP dan Ibunda Tuti Suryani yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih banyak kekurangan maupun kelemahannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan demi penyempurnaan pada masa yang akan datang . akhir kata penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi penulis pribadi dan pembaca pada umumnya.

Mataram, 14 Desember 2021

Penulis

**PENGAWASAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
ASOSIASI SOLIDARITAS MASYARAKAT UNTUK TRANSPARANSI
(SOMASI) DALAM UPAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019-2020**

Mutmainna¹ , Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP² , Drs. H. Darmansyah, M.Si³

Mahasiswa¹ , Pembimbing² , Pembimbing Utama³

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja Somasi NTB dalam melakukan Pengawasan Dalam Upaya Pengadaan Barang Dan Jasa di NTB. Pada penelitian ini menggunakan variabel Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Represif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data skunder yang berupa hasil wawancara dengan narasumber dan berupa analisis hasil pengawasan yang dilakukan oleh Somasi NTB Tahun 2019-2020.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Somasi NTB dalam upaya pengadaan barang dan jasa di NTB Tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Somasi NTB merupakan bentuk dari pengawasan partisipatif, yang merupakan fungsi dari implementasi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terutama dalam Pengadaan Barang Dan Jasa di NTB. Adapun hasil daripada pengawasan yang dilakukan oleh Somasi NTB yaitu berupa hasil analisis yang dimana didalamnya terdapat beberapa temuan berupa pelanggaran dalam upaya pengadaan barang dan jasa di NTB, dalam menanggapi hasil temuan tersebut Somasi NTB biasanya bersurat ke pihak terkait yaitu Biro PBJ, melakukan hearing dan juga release ke media. Adapun tanggapan yang dilakukan oleh Biro PBJ terkait temuan yang disampaikan oleh Somasi NTB yaitu dengan cara melakukan atau memberikan klarifikasi terkait temuan-temuan dari Somasi NTB.

Kata Kunci : Pengawasan , Somasi NTB, Pengadaan Barang Dan Jasa NTB

**SUPERVISION OF COMMUNITY SOLIDARITY ASSOCIATIONS
INSTITUTIONS (NGO) FOR TRANSPARENCY (SOMASI) IN THE
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES (PBJ) PROVINCE OF WEST
NUSA TENGGARA IN 2019-2020**

Mutmainna¹, Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP², Drs. H. Darmansyah, M.Si³
Student¹, Advisor², Principal Advisor³
Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

The purpose of this study was to assess the performance of NTB Somasi in supervising NTB's procurement efforts for goods and services. The variables of preventative supervision and repressive supervision were used in this study. This study is a descriptive qualitative research. Primary and secondary data in the form of interviews with resource persons and an analysis of the findings of supervision undertaken by the NTB Somasi for 2019-2020 were the main sources of data.


The findings of this study show that the supervision conducted by the NTB Somasi in the effort to procure goods and services in NTB in 2019-2020 is a type of participatory supervision, which is a function of the implementation of community participation in conducting supervision, particularly in the procurement of goods and services in NTB. The results of the NTB Somasi's monitoring are in the form of analysis results, which include various discoveries in the form of violations in the endeavor to buy products and services, according to an NTB press release. The PBJ Bureau's response to the findings submitted by the NTB Somasi was to conduct or provide clarification on the findings submitted by the NTB Somasi.

Keywords: *Supervision, Somasi NTB, Procurement of Goods and Services NTB*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
MUHAMMADIYAH MATARAM


Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601



DAFTAR ISI

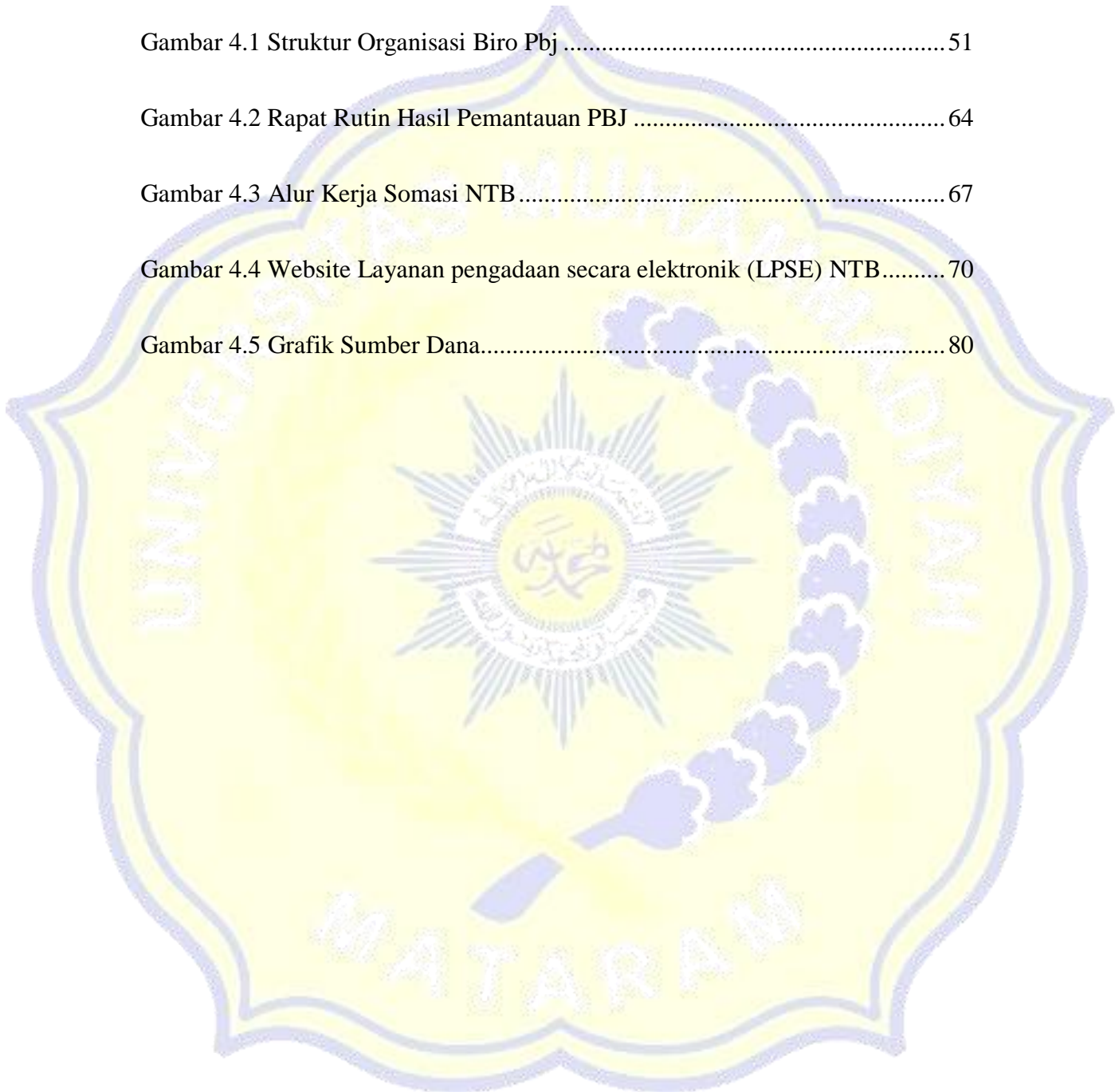
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
SURAT BEBAS PLAGIASI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTACK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5

1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Pengawasan.....	14
2.2.1. Pengertian Pengawasan.....	14
2.2.2. Tujuan Pengawasan.....	15
2.2.3. Fungsi Pengawasan	16
2.2.4. Jenis-jenis Pengawasan.....	16
2.2.5. Teknik-teknik Pengawasan	17
2.2.6. Ruang Lingkup Pengawasan.....	20
2.3 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).....	22
2.3.1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).....	22
2.3.2. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).....	23
2.4 Pengadaan Barang dan Jasa	25
2.4.1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa	25
2.4.2. Jenis-Jenis Pengadaan Barang dan Jasa	26
2.4.3. Etika Pengadaan Barang dan Jasa.....	27
2.5 Kerangka Pikir Penelitian	29
2.6 Definisi Konseptual.....	30
2.7 Definisi Operasional	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data	32
3.3.1. Sumber Data Primer.....	32
3.3.2. Sumber Data Sekunder	33

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.4 Penentuan informan	36
3.5 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Profil Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat ...	38
4.1.1. Struktur Organisasi Somasi NTB.....	42
4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pekerja SOMASI-NTB	44
4.2. Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Provinsi Ntb	48
4.2.1. Visi dan Misi.....	49
4.2.2. Tujuan dan Sasaran.....	49
4.2.3. Struktur Organisasi BIRO PBJ	51
4.2.4. Tugas Dan Fungsi BIRO PBJ	52
4.3. Pengawasan Somasi Dalam Upaya Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2020	60
4.3.1. Pengawasan Preventif.....	61
4.3.2. Pengawasan Represif.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	83
5.1. Kesimpulan	83
5.2. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Biro Pbj	51
Gambar 4.2 Rapat Rutin Hasil Pemantauan PBJ	64
Gambar 4.3 Alur Kerja Somasi NTB	67
Gambar 4.4 Website Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) NTB	70
Gambar 4.5 Grafik Sumber Dana	80



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Definisi Operasional	31
Tabel 3.1 Unit Analisis Data Primer	33
Tabel 3.2 Unit Analisis Data Sekunder.....	34
Tabel 3.3 Informan Peneliti.....	36
Tabel 4.1 Pengurus Somasi Ntb.....	43
Tabel 4.2 Rencana Kerja Somasi NTB	64
Tabel 4.3 Cv. darel wan pratama	76
Tabel 4.4 Ud. Sinar Mutiara.....	77
Tabel 4.5 Pengelompokkan Tender Hasil Negosiasi >1 Milyar	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang didalamnya juga banyak terbentuk kelompok dan susunan organisasi. Kelompok-kelompok atau organisasi tersebut memiliki tujuan masing-masing. Visi dan misi yang dimilikinya digunakan untuk mencapai tujuannya. Terdapat organisasi pemerintah dan non pemerintah. Pada organisasi pemerintah merupakan organisasi yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah sedangkan untuk organisasi non pemerintah merupakan organisasi yang terbentuk secara asas kesatuan dari masyarakat di beberapa daerah tertentu. Salah satunya ialah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Nayabarani, 2017). LSM merupakan lembaga non pemerintah yang bidang aktivitasnya cenderung kepada kegiatan kemanusiaan dan kemasyarakatan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar lingkungannya.

Kehadiran LSM disuatu wilayah atau daerah sangat membantu dan meringankan masyarakat sekitarnya karena LSM tersebut bertugas untuk bekerja secara sosialisme dengan mementingkan kebutuhan masyarakat dibandingkan lembaganya sendiri. Salah satu aktivitas bidang yang dilakukan yaitu bidang pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa ini biasanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau instansi swasta seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan barang dan jasa dimana prosesnya

diawali dari perencanaan kebutuhan hingga diselesaikan seluruh kegiatan dalam memperoleh barang dan jasa. Hal ini juga dijelaskan pada Peraturan Presiden RI no 54 Tahun 2010 terkait dengan pengadaan barang dan jasa menjelaskan pengadaan barang dan jasa adalah cara strategis untuk memproteksi dan sebagai preferensi pelaku usaha negeri (Alfian, 2015).

Informasi pengadaan barang dan jasa juga dicantumkan pada UU No 1 Tahun 2021 terkait dengan standar layanan informasi public menyatakan bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Selanjutnya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah atau daerah tertentu bahkan negara. Pengadaan barang dan jasa juga membantu lebih efektif dan efisien. Pada proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang etika pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara tertib. Tanggung jawabn juga harus diutamakan dalam mencapai sasaran yang tepat demi kelancaran dan ketepatan dalam mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa (Arsana, 2016). Kemudian, bekerja secara professional serta mandiri dalam menjaga keberhasilan dokumen pengadaan barang dan jasa karena sifatnya juga rahasia untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.

Pengadaan barang dan jasa juga perlu dilakukan secara waspada dan berusaha untuk menghindari penyalahgunaan wewenang sehingga dapat menimbulkan kolusi, mementingkan kepentingan pribadi dan dapat merugikan masyarakat daerah bahkan negara. Hal ini sangat diperlukan terutama di era reformasi ini. Pada era reformasi ini penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah harus dilakukan secara bersih dan transparansi. Bentuk transparansi ini merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta diikuti dengan tanggung jawab yang tinggi sehingga dapat mencegah dan menghindarkan dari segala bentuk korupsi.

Pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dalam mencegah adanya penyelewengan dari tanggung jawab yang dilakukan. Salah satu pihak yang dapat berpartisipasi dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM sangat berperan penting dalam mengupayakan pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa supaya menghindarkan dari berbagai macam adanya penyelewengan dan korupsi.

Somasi NTB adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang bersifat nirlaba dan independen. Dalam kiprahnya sifat keanggotaan Somasi NTB adalah terbuka namun terseleksi. Sehingga dapat menampung sebanyak mungkin keterlibatan masyarakat yang tidak memiliki reputasi korupsi untuk menegakkan keadilan. Sebagai lembaga independen yang berfungsi melakukan kontrol sosial, prinsip dasar yang akan menjadi pola kerja

Somasi NTB bersandar pada gerakan moral bukan gerakan politik, terbuka baik dari segi manajemen maupun hasil kerjanya.

Perkumpulan ini akan memberikan pelayanan kepada kelompok-kelompok tertindas, seperti buruh, petani, rakyat miskin kota, kelompok perempuan dan individual progresif melalui pendidikan kritis, distribusi informasi, pengorganisasian, dan pendampingan. Tujuan pelayanan tersebut guna membangun kemandirian rakyat untuk terlibat dalam dinamika perubahan sosial menuju tatanan sosial yang lebih adil dan sejahtera.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada periode tahun 2019-2020 terjadi penyelewengan oleh proyek kawalan TP4D (Tim Pengaman dan Pengawal Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) di NTB. Hal ini diselidiki langsung oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yaitu Stranas PK yang menyebutkan sebanyak 93% secara nasional terjadi kegiatan penyuapan. PK ini berfokus untuk mencegah korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa di NTB. Praktik suap ini dterjadi pada bidang pengadaan barang dan jasa pembangunan. Penyedia jasa atau kontraktor ini menang tender atas keterpaksaan namun jika tidak memberikan suapan maka penyedia jasa juga tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Pembangunan nasional ini untuk pengadaan rumah layak huni dari pemerintah namun di selewengkan (Stranaspk.kpk.go.id) .

Hal ini menyebabkan pihak LSM harus melakukan pengawasan untuk menghindarkan dan mencegah terjadinya penyelewengan dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Melalui kondisi tersebut menyebabkan

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PENGAWASAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) ASOSIASI SOLIDARITAS MASYARAKAT UNTUK TRANSPARANSI (SOMASI) DALAM UPAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut dan pemaparan latar belakang maka rumusan permasalahannya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asosiasi Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (SOMASI) dalam upaya pengadaan barang dan jasa di NTB tahun 2019-2020 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asosiasi Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (SOMASI) dalam upaya pengadaan barang dan jasa di NTB tahun 2019-2020.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi manfaat praktis dan teoritis sebagai berikut penjelasannya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian literature dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan pengawasan LSM dalam upaya pengadaan barang dan jasa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi LSM di NTB untuk melakukan upaya pengawasan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk menghindari penyelewengan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Rilistian Lalu (2013) yang berjudul “Peran LSM FITRA dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD Jawa Tengah (studi kasus APBD Bantuan Sosial Provinsi Tahun 2012)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa “pengawasan yang dilakukan oleh LSM FITRA bisa maksimal manakala pemerintah pun bisa menjadi partner yang baik dan mendukung aktivitas LSM. Misalkan dalam pemberian informasi atau dokumen yang dibutuhkan. Tidak ada yang ditutupi dalam informasi yang memang seharusnya bisa diakses oleh publik. Maka tentunya dengan adanya hal ini akan ada perubahan di Jawa Tengah sendiri ketika pemerintah dan LSM khususnya FITRA bisa menjadi partner yang saling melengkapi dalam menjalankan pemerintahan terutama pada bidang pengelolaan anggaran..

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fiqri Fadillah, Aidin (2021) yang berjudul “Peran LSM dalam Melakukan Advokasi Terhadap Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus LSM Malang Berwarna, Kota Malang) ”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Praktik sosial yang dilakukan oleh LSM Malang Berwarna dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah

bidang PAUD di Kota Malang dengan meningkatkan peran serta masyarakat merupakan sebuah dualitas struktur. Karena banyak tindakan seperti strategi, upaya dan kontribusi dalam perilaku kontrol kebijakan PAUD ini yang tidak terlepas dari aturan perundangan mulai UUD 1945 sampai Peraturan Daerah itu sendiri. Disamping itu dalam melakukan strategi dan kontribusi pelaksanaan kontrol kebijakan PAUD juga melakukan sebuah terobosan baru yang ada dalam kajian Giddens yaitu proses signifikansi, dominasi dan legitimasi juga tidak terlepas peran partisipatif orang tua. Hal ini dikarenakan agen dan struktur bersifat saling melengkapi atau timbal balik satu sama lain. Secara langsung peran aktiv LSM ini terdapat pada pengembangan masyarakat sipil untuk mau berpartisipasi langsung dalam pengawalan kebijakan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hendi Sudiantoro, Rehnalemken Ginting (2019) yang berjudul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pembrantasan Korupsi”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta, Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (PUSTAPAKO) Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada Yogyakarta maka dapat disimpulkan bahwa peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberantasan korupsi sudah diatur dalam undang-undang.

Menurut prespektif kriminologis peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dengan teori pilihan rasional dan teori detensi atau teori relatif dimana masyarakat dapat melakukan pencegahan khususnya terhadap niat jahat

serta membatasi ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi. Hambatan yang dialami Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya pemberantasan korupsi berupa Hambatan internal dan Hambatan eksternal.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ari Ganjar Herdiansah, Randi (2016) yang berjudul “Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pentingnya peran Ormas/LSM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ormas/LSM tidak hanya menjadi penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan negara, tetapi juga memberikan kontribusi positif sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial politik, Ormas dan LSM yang ada di Indonesia turut andil dalam menjadi stabilitas ketertiban dan keamanan, dan diharapkan ke depannya akan tetap memainkan peran tersebut sehingga dapat menopang kesatuan bangsa dan NKRI.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Khairil Akbar, Zahlul Pasha Karim, Nyak Fadlullah, Muhammad Siddiq Armia (2021) yang berjudul “Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi”. Hasil penelitian ini yaitu tidak ada sistem pengawasan khusus (juga tidak ada lembaga khusus) yang melakukan pengawasan mulai tahap perencanaan, penganggaran, dan tahap pengimplemantasian DOKA. Pengawasan yang dilakukan selama ini dianggap

sama dengan pengawasan terhadap sumber anggaran daerah pada umumnya yang melibatkan berbagai lembaga pengawas baik internal maupun eksternal. Namun peneliti menemukan beberapa perbedaan dalam artian negatif (pengawasan DOKA lebih buruk dari pengawasan sumber anggaran lainnya). Bahkan pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut selama ini masih sangat lemah. Dampak dari sistem pengawasan sebagaimana diterangkan pada poin pertama sama sekali tidak efektif dan dengan sistem yang demikian cenderung membuka peluang terciptanya praktik korupsi sejak awal perencanaan DOKA.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran LSM FITRA dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD Jawa Tengah (studi kasus APBD Bantuan Sosial Provinsi Tahun 2012)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penelitian ini sama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijakan publik. ➤ Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perbedaannya terletak pada subjek penelitian yaitu APBD Jawa Tengah (studi kasus APBD Bantuan Sosial Provinsi Tahun 2012). Sedangkan penelitian ini yaitu

		deskriptif dengan analisis kualitatif	pengadaan barang dan jasa.
2.	Peran LSM dalam Melakukan Advokasi Terhadap Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus LSM Malang Berwarna, Kota Malang)	<p>➤ Penelitian ini sama-sama melakukan pengawasan serta advokasi terhadap pelaksanaan dan kebijakan publik.</p> <p>➤ Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif.</p>	➤ Perbedaan penelitian yaitu memiliki fokus pada peran sebuah lembaga swadaya masyarakat yang melakukan advokasi terhadap kebijakan, sedangkan penelitian ini memiliki fokus ke pengawasan lembaga swadaya masyarakat terhadap pengadaan barang dan jasa
3.	Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pembrantasan Korupsi	➤ Persamaan Penelitian ini yaitu terletak pada peran LSM dalam upaya melakukan tranparansi terhadap	➤ Perbedaannya terletak pada subjek penelitian yaitu Pembrantasan Korupsi Sedangkan penelitian

		<p>setiap kebijakan publik.</p> <p>➤ Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif</p>	<p>ini yaitu pengadaan barang dan jasa.</p> <p>➤ Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu peran , sedangkan penelitian ini yaitu pengawasan.</p>
4.	<p>Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia</p>	<p>➤ Penelitian ini sama-sama mengawasi proses pembangunan, baik itu infrastruktur maupun proses pengadaan barang dan jasa.</p> <p>➤ Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif.</p>	<p>➤ Perbedaan penelitian yaitu memiliki fokus pada Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia, sedangkan penelitian ini</p>

			memiliki fokus ke pengawasan lembaga swadaya masyarakat terhadap pengadaan barang dan jasa
5.	Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penelitian ini sama-sama menggunakan teori pengawasan dalam melakukan penelitiannya ➤ Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perbedaan penelitian yaitu memiliki fokus pada Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh, sedangkan penelitian ini memiliki fokus ke pengawasan lembaga swadaya masyarakat terhadap pengadaan barang dan jasa

Sumber :Diolah Oleh Peneliti 2021

2.2 Pengawasan

2.2.1 Pengertian Pengawasan

Secara umum pengawasan dapat diartikan sebagai perbuatan untuk melihat dan memonitor terhadap orang agar sesuai dengan kehendak yang telah ditentukan sebelumnya. Ismail Shaleh dalam (O.C. Kaligis, 2006:42), pengawasan adalah sesuatu yang bersifat kodrati yang diperlukan dalam kehidupan manusia maupun dalam kehidupan organisasi. Pengawasan adalah bagian dari mekanisme sistem suatu mata rantai yang mempunyai peran tertentu.

Menurut M. Manullang (2002:173), mengatakan bahwa :
“Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut S.P Siagian (2004:126) pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan dengan rencana yang ditetapkan, kebijakan-kebijakan yang telah digariskan dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut. Pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai pelaksanaan, serta mengadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu.

2.2.2 Tujuan Pengawasan

Tujuan utama dari pengawasan yaitu mengusahakan supaya apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Mencari dan memberitahu kelemahan-kelemahan yang dihadapi. Adapun tujuan pengawasan menurut (Sukarna, 1993,.112) antara lain :

1. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan lancar atau tidak.
2. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang serupa atau timbulnya kesalahan baru.
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam planning terarah kepada sasarannya sesuai dengan yang telah ditentukan.
4. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya telah ditetapkan dalam planning atau tidak.
5. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam rencana (standar) dan sebagai tambahan.
6. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

2.2.3 Fungsi Pengawasan

Menurut Belkoui, yang dikutip oleh Harahap (2000:35), adapun fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup 4 unsur, yaitu :

1. Penetapan standar pelaksana.
2. Penentuan ukuran-ukuran pelaksana.
3. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Mengambil tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Pada hakekatnya fungsi pengawasan adalah mngontrol jalannya suatu prosedur kegiatan, dan menjadi pengarah agar tidak terjadi kekeliruan dan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

2.2.4 Jenis-jenis Pengawasan

Menurut Hasibuan (2005: 248) pengawasan atau pengendalian dikenal atas beberapa jenis yang dapat dijelaskan dan disebutkan yaitu sebagai berikut:

1. Internal Control

Internal control adalah pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengendalian ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan dan lain-lain.

Audit control adalah pemeriksaan atau penilaian atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembukuan perusahaan. Jadi, pengawasan atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan suatu perusahaan.

2. External Control

External control adalah pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Pengendalian ekstern ini dapat dilakukan secara formal atau informal, misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat.

3. Formal Control

Formal control adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi yang dapat dilakukan secara formal atau informal. Contohnya seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BUMN dan lain-lain. Dewan Komisaris terhadap PT yang bersangkutan.

4. Informal Control

Informal control adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya melalui media massa cetak atau elektronik dan lain-lainya.

2.2.5 Teknik-teknik Pengawasan

Dalam Siagian (2008:259–260) Untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah terjadi deviasi atau tidak, manajemen perlu mengamati jalannya kegiatan operasional tersebut. Berbagai teknik yang dapat digunakan dalam pengawasan antara lain adalah:

- a. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana cara para petugas operasional dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat sangat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengamatan

langsung berbagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi “on the spot” bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi dengan demikian manajemen dapat segera “meluruskan” tindakan para pelaksana apabila diperlukan dan manajemen langsung dapat memberikan pengarahannya tentang tata cara bekerja yang benar. Disamping itu dengan pengamatan langsung, para bawahan akan merasa diperhatikan oleh pemimpinnya sehingga dalam diri bawahan tidak timbul kesan bahwa pimpinan “jauh” dan “tidak terjangkau” oleh para bawahan tersebut. Kelemahan pengguna teknik ini terutama terletak pada kenyataan bahwa waktu manajemen yang sangat berharga itu akan sedikit tersita untuk melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk ini.

- b. Melalui laporan lisan atau tertulis dari pada penyelia yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya. Dalam semua organisasi, penyampaian laporan dari seseorang bawahan kepada atasannya yang merupakan hal yang bukan hanya biasa terjadi akan tetapi merupakan keharusan. Dalam rangka pelaksanaan suatu strategi laporan yang memenuhi berbagai persyaratan, seperti: penyampaian secara berkala yang frekuensinya tergantung pada “kebiasaan” yang berlaku pada organisasi, dalam format yang sudah ditentukan, mengandung informasi yang bersifat kital yang berarti tidak hanya menyajikan segi-segi positif dari pelaksanaan kegiatan operasional akan tetapi juga situasi negatif yang perlu segera mendapat perhatian manajemen.
- c. Melalui penggunaan kuesioner yang respondennya adalah para pelaksana kegiatan operasional. Penggunaan kuesioner sangat bermanfaat apabila maksudnya untuk menggali informasi tentang situasi yang nyata dihadapi dilapangan dari sejumlah besar tenaga pelaksana kegiatan operasional. Kiranya relevan untuk menambahkan bahwa ada kalanya manajemen “segar” menggunakan instrumen ini dalam melakukan pengawasan karena, di samping memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk menyusun berbagai pertanyaan yang dipandang relevan dengan untuk ditanyakan, juga tidak jarang terjadi bahwa jumlah responden yang mengembalikan kuesioner tidak cukup banyak sehingga informasi yang diperoleh pun hanya bersifat parsial yang ada kalanya kurang bermanfaat sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang apakah strategi implementasikan dengan baik atau tidak.
- d. Wawancara, Apabila diperlukan wawancara dengan para penyelenggara berbagai kegiatan operasional pun dapat dilakukan dalam rangka pengawasan. Telah umum diketahui bahwa terdapat

tiga bentuk wawancara, yaitu yang tidak terstruktur, yang terstruktur dan kombinasi keduanya. Jika manajemen akan menggunakan teknik ini sebagai instrument pengawasan dalam rangka implementasi strategi organisasi, manajemen yang bersangkutan harus memutuskan bentuk mana yang digunakan. Bentuk apapun yang digunakan, penting memperhatikan bahwa manaer hendaknya tidak “terjerumus” pada bias-bias tertentu, baik yang sifatnya pribadi, cultural maupun keperilakuan. Tegasnya dalam wawancaram harus terjamin kebebasan pihak yang diwawancarai untuk menyampaikan informasi yang menyangkut masalah dan segi-segi negatif penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional tanpa dihantui oleh ketakutan akan menerima ganjaran.

Situmorang dan Juhir (1994:27) mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal yaitu:

- a) Pengawasan langsung dan Pengawasan tidak langsung
 - 1) Pengawasan Langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan langsung pula dari pelaksana.
 - 2) Pengawasan Tidak Langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”.
- b) Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif
 - 1) Pengawasan Preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
 - 2) Pengawasan Represif, dilakukan melauai post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
- c) Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern
 - 1) Pengawasan Intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam orgainisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- 2) Pengawasan Ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.

2.2.6 Ruang Lingkup Pengawasan

Setiap organisasi menginginkan supaya apa yang direncanakan akan dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Untuk itu diperlukannya pengawasan terhadap aktivitas yang akan dilakukan sebelumnya, baik yang sedang berjalan atau sesudah proses kegiatan tersebut berakhir. Menurut Suwatno dalam bukunya Asas-Asas Manajemen Sumber Daya Manusia menyebutkan ruang lingkup pengawasan, sebagai berikut:

1. Fase Awal Pengawasan ini dimaksudkan untuk mencegah serta membatasi sedini mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan sebelum terjadi.
2. Pengawasan Tengah Berjalan Pengawasan ini dilakukan untuk memantau kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dengan membandingkan antara standar dengan hasil kerja, sehingga perlu adanya tindakan-tindakan korektif untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan.
3. Pengawasan Akhir Merupakan tindakan korektif setelah aktivitas selesai, tujuan selanjutnya untuk dapat memberikan masukan pada

organisasi bagi tindakan-tindakan perencanaan yang akan berulang dimasa yang akan data.

Suwatno, 2002:283. Ruang lingkup merupakan cakupan atau batas-batasan daripada pengawasan tersebut. Menurut pendapat Teguh Pudjo Muljono dalam bukunya Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil yang menyebutkan mengenai ruang lingkup daripada pengawasan, sebagai berikut:

1. Pengawasan dalam arti sempit yaitu berupa pengawasan administratif yang mempunyai ruang lingkup untuk mengetahui kebenaran data-data administratif.
2. Pengawasan dalam arti luas yang merupakan pengendalian di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang dikenal dengan manajemen kontrol yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas yaitu di bidang:
 - a. Financial keuangan adalah menguji tingkat kewajaran dan kecermatan dalam melakukan evaluasi kelayakan internal kontrol yang ditetapkan apakah telah memadai.
 - b. Operational operasional merupakan kegiatan penilaian yang sistematis dan berorientasi untuk masa yang akan datang atas semua kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi, dengan

tujuan untuk mengadakan perbaikan rencana kerja organisasi maupun pencapaian tujuan itu sendiri.

- c. Management Policy merupakan suatu penilaian yang dilaksanakan secara sistematis, independent dan berorientasi ke masa yang akan datang atas semua kegiatan yang dilaksanakan oleh manajemen, melalui perbaikan-perbaikan dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.

Muljono, 2001:461. Berdasarkan uraian-uraian di atas, bahwa pengawasan memiliki fase-fase dalam hal pelaksanaannya, disamping juga ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan administratif secara sempit dan pengawasan secara luas dengan ruang lingkungannya di berbagai bidang yaitu: financial keuangan, operational operasional dan policy kebijakan.

2.3 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

2.3.1 Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu organisasi yang anggotanya berupa masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela dapat berkehendak secara pribadi melalui niat untuk bergerak diberbagai bidang kegiatan. Kegiatan ini ditentukan dan ditetapkan oleh lembaga tersebut sebagai wujud dari partisipasi masyarakatnya dalam upaya meningkatkan taraf hidup

masyarakat, perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya yang dititikberatkan pada pengabdian swadaya. LSM secara politis diartikan sebagai organisasi keswadayaan masyarakat yang diorientasikan sebagai tandingan pemerintah (Homsiah, 2017).

Hal ini juga bisa diartikan sebagai bentuk perlawanan maupun bentuk persaingan dari pemerintah sebagai lembaga non pemerintah dari LSM. LSM juga berbentuk Gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan dengan tujuan menumbuhkan kesadaran serta kemandiriannya masyarakat untuk perekonomiannya dapat meningkat dan lebih sejahtera. LSM bisa berperan dalam mengembangkan pembangunan di tingkat *grassroot* (Jamila, 2018). Secara umum melalui penciptaan serta dukungan pada kelompok swadaya local. Kelompok ini secara umum bisa tersusun dari 20 hingga 90 anggota. Sasarannya untuk menjadikan kelompok tersebut berswadaya setelah kegiatan proyek yang dilakukan selesai.

2.3.2 Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Terdapat beberapa peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendukung kelompok swadaya untuk berkembang, maju dan sejahtera. LSM berperan untuk mengidentifikasi kebutuhan kelompok local terdahulu terkait dengan strateginya juga dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian, dilanjutkan dengan kegiatan mobilisasi serta agitasi dalam mewujudkan usaha yang aktif dalam

mengejar pemenuhan kebutuhannya yang diidentifikasi tersebut. Setelah dimobilisasi maka dirumuskan berbagai kegiatan terutama pada kegiatan jangka panjang untuk mengejar sasarannya. Supaya tujuannya cepat tercapai (Grasia, 2017) . Tujuan yang sudah tercapai selanjutnya akan dimobilisasi lagi pada sumber daya local ataupun eksternal dalam kegiatan pembangunan pedesaan. Berbagai bentuk peraturan dan perencanaan yang dilakukan terkait kegiatan harus dijalankan semua fungsinya sesuai perannya masing masing supaya waktu pencapaian yang ditargetkan sesuai.

LSM juga berperan dalam mendukung dan melakukan pemberdayaan bagi masyarakat yang sangat esensial dengan tujuan penciptaan pembangunan yang berkelanjutan. LSM perlu juga meningkatkan pengaruh pada perpolitikan secara lebih meluas melalui berbagai jalinan dan relasi kerja sama baik didalam suatu negara maupun lembaga internasional luar lainnya (Hardi, 2016). Kemudian, LSM berperan juga dalam mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan serta mengawasi jalannya kegiatan supaya berjalan transparansi agar tidak terjadi penyelewengan ataupun penyimpangan.

2.4 Pengadaan Barang dan Jasa

2.4.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun instansi pada sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan barang dan jasa oleh suatu lembaga dimana prosesnya tersebut dimulai perencanaan hingga sampai bisa terselesaikannya seluruh kegiatan dalam mendapatkan pengadaan barang dan jasa tersebut (Arsyam, 2016). Pada proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang etika pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara tertib. Tanggung jawabn juga harus diutamakan dalam mencapai sasaran yang tepat demi kelancaran dan ketepatan dalam mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa. Kemudian, bekerja secara professional serta mandiri dalam menjaga keberhasilan dokumen pengadaan barang dan jasa karena sifatnya juga rahasia untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut (Grasia, 2017) .

Pengadaan barang dan jasa juga perlu dilakukan secara waspada dan berusaha untuk menghindari penyalahgunaan wewenang sehingga dapat menimbulkan kolusi, mementingkan kepentingan pribadi dan dapat merugikan masyarakat daerah bahkan negara. Hal ini sangat diperlukan terutama di era reformasi ini. Pada era reformasi ini

penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah harus dilakukan secara berish dan transparansi. Pengadaan barang dan jasa ini dilakukan melalui swakelola dan pemilihan penyedia barang atau jasa. Kegiatan pengadaan barang dan jasa ini meliputi barang, pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi.

2.4.2 Jenis-Jenis Pengadaan Barang dan Jasa

Terdapat beberapa jenis-jenis pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dalam menentukan penyedia barang dan jasa. Berikut adalah pengkategorianya :

1. Pengadaan Barang dan Jasa Umum

Pengadaan barang ini merupakan metode pemilihan penyedia barang baik barang maupun konstruksi terhadap semua pekerjaan supaya bisa diikuti oleh semua pihak penyedia barang dan jasa sehingga bisa memenuhi syarat. Pengadaan barang dan jasa secara umum ini dengan nilai diatas Lima Miliar Rupiah (Arsyam, 2016).

2. Pengadaan Barang dan Jasa Terbatas

Pengadaan ini merupakan bentuk cara dalam menyediakan barang dan jasa atas jumlah penyedia yang mampu dan bisa dilaksanakan atau diyakini terbatas dan pekerjaan yang kompleks.

3. Pemilihan Langsung

Pemilihan barang dan jasa langsung dengan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dalam pekerjaan yang nilainya tinggi Lima Miliar Rupiah.

4. Pengadaan Langsung

Pengadaan barang dan jasa secara langsung dapat ditujukan kepada oenyedia barang dan jasa dengan penunjukkan langsung dengan nilai hingga Dua Ratus Juta Rupiah.

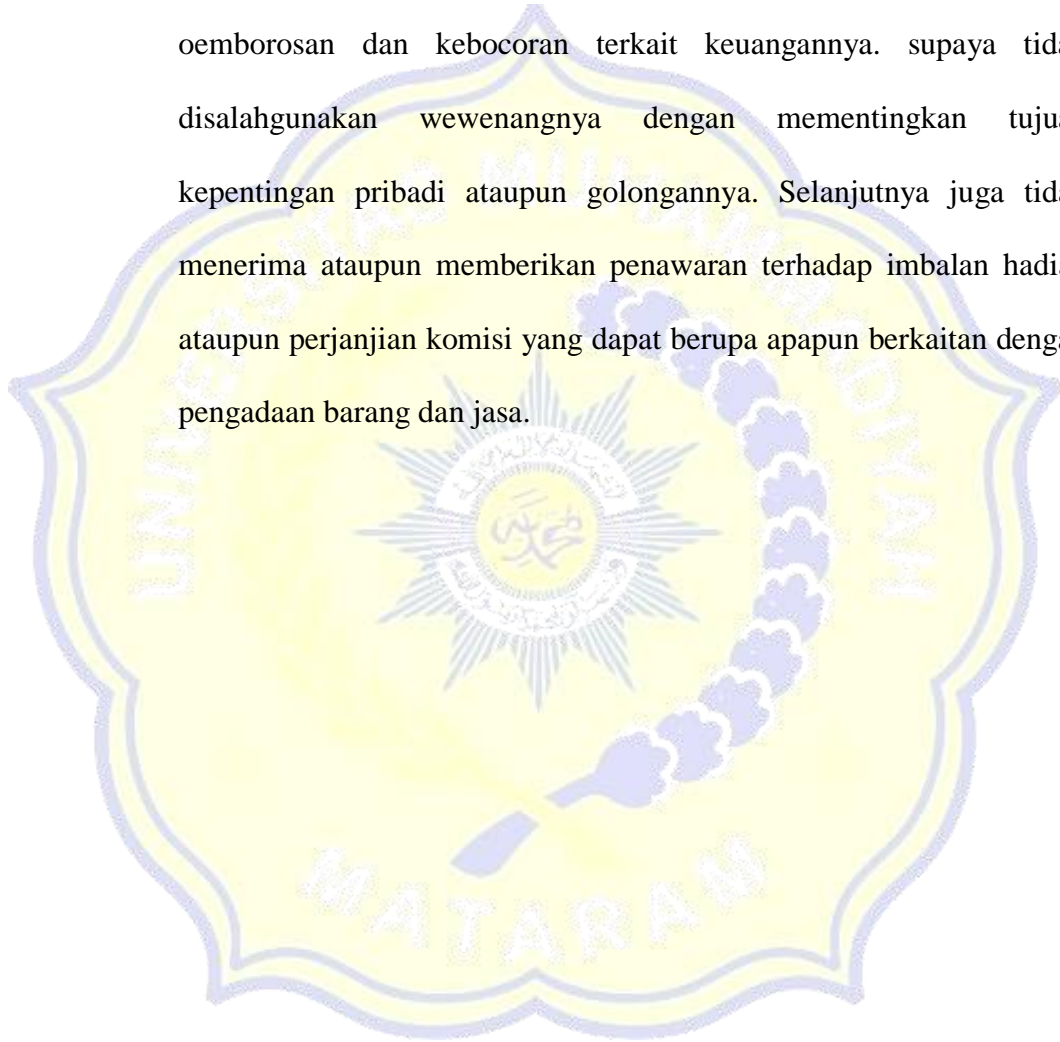
5. Penunjukkan Langsung

Penunjukkan ini merupakan metode pemilihan secara langsung terhadap penyedia barang dan jasa dengan menunjuk secara langsung hanya 1 orang saja penyediaanya (Hardi, 2016).

2.4.3 Etika Pengadaan Barang dan Jasa

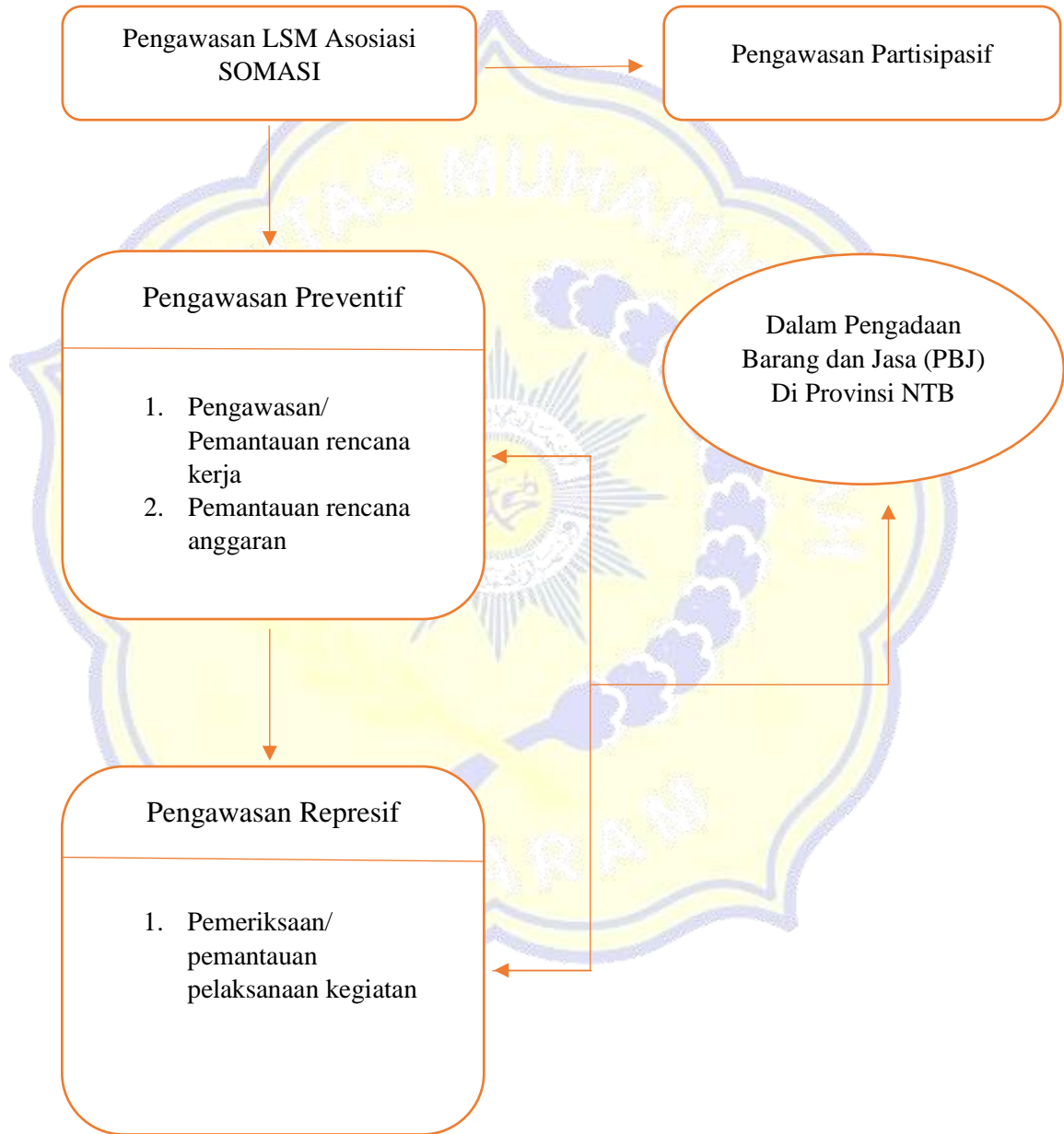
Terdapat nenerapa etika terkait pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa harus melaksanakan tugasnya secara tertib dan disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasarannya serta kelancaran pada tujuan pengadaan barang dan jasa. Penyedia pengadaan barang dan jasa harus bersikap professional dan mandiri serta dapat menjaga keberhasilan dokumennya supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak lainnya dan mencegah terjadinya penyimpangan. Saling memberikan pengaruh yang baik secara langsung supaya bisa

menghindari persaingan yang tidak sehat dan mencegah pertentangan berbagai kepentingan oleh berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung (Jamila, 2018). Penyedia pengadaan barang dan jasa harus mencegah serta melakukan penghindaran dari aktivitas oemborosan dan kebocoran terkait keuangannya. supaya tidak disalahgunakan wewenangnya dengan mementingkan tujuan kepentingan pribadi ataupun golongannya. Selanjutnya juga tidak menerima ataupun memberikan penawaran terhadap imbalan hadiah ataupun perjanjian komisi yang dapat berupa apapun berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.



2.5 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber :Diolah Oleh Peneliti 2021

2.6 Definisi Konseptual

Menurut Hatch dan Farhady dalam Sugiyono (2015:38) Variabel merupakan atribut atau proyek yang memiliki variasi antara satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

1. Pengawasan merupakan segala aktivitas pengamatan yang dilakukan untuk menjamin apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan sebagai awal dalam langkah melakukan penilaian dan kemudian melakukan perbaikan terhadap kegiatan yang menyimpang dari rencana semula.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu organisasi yang anggotanya berupa masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela dapat berkehendak secara pribadi melalui niat untuk bergerak diberbagai bidang kegiatan. Kegiatan ini ditentukan dan ditetapkan oleh lembaga tersebut sebagai wujud dari partisipasi masyarakatnya dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya yang dititikberatkan pada pengabdian swadaya.
3. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun instansi pada sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan barang dan jasa oleh suatu lembaga dimana prosesnya tersebut dimulai perencanaan hingga sampai bisa terselesaikannya

seluruh kegiatan dalam mendapatkan pengadaan barang dan jasa tersebut (Arsyam, 2016).

4. Indikator-Indikator Pengawasan

1. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan melalui pre-audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
2. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

2.7 Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2014), definisi operasional adalah penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seorang peneliti akan mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. Berikut table mengenai operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2.2
Definisi Operasional

NO	Variabel	Indikator
1	Pengawasan Preventif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan/ Pemantauan rencana kerja 2. Pemantauan rencana anggaran
2	Pengawasan Represif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan/ pemantauan pelaksanaan kegiatan

Sumber: Diolah Oleh Penulis Tahun 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan memaparkan hasil secara deskriptif. Hasilnya akan dilakukan pengolahan serta akan dilakukan Teknik reduksi. Data bisa ditampilkan secara wacana (Yusuf, 2017). Pada penelitian ini bisa digunakan dalam menganalisis partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya pengawasan pengadaan barang dan jasa. Tujuannya yaitu berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan serta fenomena yang ada. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif. Berfungsi sebagai pemaparan data secara deskriptif dan terstruktur. Sesuai dengan metode tersebut maka hasilnya akan dihubungkan dengan kenyataan yang ada sebenarnya.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasannya :

3.3.1. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber yang pertama dan terpenting dalam penelitian. Fungsinya untuk menyelesaikan dan menjawab rumusan masalah. Sumber data ini didapatkan dari wawancara serta kegiatan observasi secara langsung. Wawancara dengan informan secara langsung yang ditentukan serta observasi di lokasi.

Tabel 3.1
Unit Analisis Data Primer

NO	Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber Data
1	Pengawasan Preventif	1. Pengawasan/ pemantauan rencana kerja 2. Pemantauan rencana anggaran	1. Bagaimana Pengawasan/ pemantauan rencana kerja 2. Bagaimana Pemantauan rencana anggaran	1. Koordinator Badan Pekerja Sekretaris SOMASI 2. Bendahara SOMASI
2	Pengawasan Represif	1. Pemeriksaan/ pemantauan pelaksanaan kegiatan	1. Bagaimana Pemeriksaan/ pemantauan pelaksanaan kegiatan	1. Koordinator Badan Pekerja Sekretaris SOMASI 2. Sekretaris Badan Pekerja Ex Officio Divisi Investigasi dan Advokasi

Sumber :Diolah Oleh Peneliti 2021

3.3.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang berfungsi untuk menunjang sumber pertama yaitu primer. Tujuannya supaya bisa lebih memberikan kekuatan sumber utama dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Sumber penelitian secara sekunder didapatkan dari jurnal, artikel dan buku.

Tabel 3.2
Unit Analisis Data Sekunder

NO	Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber Data
1	Pengawasan Preventif	1. Pengawasan/ pemantauan rencana kerja 2. Pemantauan rencana anggaran	1. Bagaimana Pengawasan/ pemantauan rencana kerja 2. Bagaimana Pemantauan rencana anggaran	1. Koordinator Badan Pekerja Sekretaris SOMASI 2. Bendahara SOMASI
2	Pengawasan Represif	1. Pemeriksaan/ pemantauan pelaksanaan kegiatan	Bagaimana Pemeriksaan /pemantauan pelaksanaan kegiatan	1. Koordinator Badan Pekerja Sekretaris SOMASI 2. Sekretaris Badan Pekerja Ex Officio Divisi Investigasi dan Advokasi

Sumber :Diolah Oleh Peneliti 2021

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (SOMASI) Nusa Tenggara Barat. Waktu penelitian dilaksanakan selama 1 bulan. Dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2022 sampai tanggal 30 Januari 2022.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data-data penelitian. Berikut adalah teknik pengumpulan data penelitian:

1. Observasi

Kegiatan observasi bertujuan melihat lokasi penelitian secara nyata. Tujuannya mendeskripsikan kondisi yang ada dalam penelitian. Pengetahuan yang didapatkan dari observasi ini sangat penting karena agar peneliti mengetahui karakteristiknya. Observasi penting terutama pada penelitian studi kasus. Pada penelitian ini observasi dilakukan di Kantor Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (SOMASI) Nusa Tenggara Barat.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dilakukan untuk mendapatkan data penelitian dengan cara mendatangi informan secara langsung. Secara tatap muka datang ke informan. Berusaha melemparkan pertanyaan kepada informan supaya mendapatkan data yang akurat. Wawancara juga dilakukan dengan membutuhkan pedoman wawancara supaya lebih terarah dan sesuai dengan penelitian. Pedoman ini harus sesuai indikator yang telah ditentukan. Wawancara pada penelitian ini dengan SOMASI guna mendapat data yang akurat. Wawancara secara langsung dengan mendatangi Kantor SOMASI. Narasumber yang dipilih yaitu kepala lembaga LSM tersebut.

3. Dokumentasi

Setiap penelitian harus memerlukan kegiatan pengabdian momen melalui dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian untuk mendapatkan bukti data-data penelitian yang bisa berupa video dan foto. Dokumentasi bisa didapatkan melalui observasi serta kegiatan saat wawancara.

3.4 Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu, sumber data adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita ingin ketahui atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggali data dari sumber data seperti yang tersebut diatas, Sugiyono (2013:85).

Tabel 3.3
Imforman Penelitian

NO	Imforman	Jabatan	Jumlah
1	Dwi Arie Santo	Koordinator Badan Pekerja	1 Orang
2	Jumaidi	Sekretaris Badan Pekerja Ex Officio Divisi Investigasi dan Advokasi	1 Orang
3	Bq. Yulianingsih	Bendahara	1 Orang
		Total	3 Orang

Sumber :Diolah Oleh Peneliti 2021

3.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini terdapat langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut : (Yusuf, 2017).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dalam memfilter atau menyaring data-data penelitian yang telah didapatkan. Tujuan penyaringan data-data penelitian ini agar mendapatkan data yang lebih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Reduksi data juga berfungsi untuk menyederhanakan data lagi lebih kompleks supaya mendapatkan data-data yang sesuai dengan masalah penelitian dan data yang tidak sesuai maka akan disisihkan.

2. Penyajian Data

Data yang telah dipilih dan dipilah akan disajikan secara sistematis. Penyajian data ini harus terstruktur secara rapi. Kegiatan penyajian data ini bisa dengan cara menampilkan data dengan berbagai grafik serta diagram.

3. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah direduksi kemudian juga telah disajikan melalui diagram. Kegiatan selanjutnya dengan cara menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini adalah hasil penelitian dari keseluruhan yang disimpulkan dengan menyesuaikan teori yang digunakan serta kenyataan yang ada. Kesimpulan ini berdasarkan cara kolerasi dengan teori dan realitas sesungguhnya (Yusuf, 2017).